

## **BAB IV**

### **DAMPAK EKOLOGIS ATAS PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DALAM PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN**

#### **A. Dampak Ekologis Pemindahan Ibu Kota Negara**

Pemindahan ibu kota diperlukan persiapan yang matang, tidak hanya mengenai kebutuhan lahan yang luas tetapi juga perlu adanya pertimbangan dampak yang berkaitan dengan daya dukung lingkungan, demografi, kebencanaan, pertahanan serta keamanan. Kalimantan Timur dengan sumber daya alam yang melimpah memiliki masalah utama dalam lingkungan yaitu kebakaran hutan serta banjir. Beberapa kasus yang ada di Kalimantan Timur saat ini menuai pro dan kontra dengan adanya pemindahan ibu kota baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota tidak hanya memikirkan daya dukung wilayah yang sesuai dan memenuhi kebutuhan ibu kota saja melainkan membutuhkan pertimbangan dampak-dampak lingkungan yang menjadi fokus dunia saat ini untuk menjaga keberlangsungan masa depan negara.

Hingga saat ini dampak lingkungan yang telah terjadi ialah banjir akibat pengalih fungsian lahan di wilayah ibu kota negara baru yang dulunya adalah daerah resapan air sekarang telah berkurang pohon untuk meresap air hujan sehingga mengakibatkan daerah yang berada di bawah wilayah

pembangunan ibu kota ketika hujan deras turun maka air langsung mengalir membanjiri perkampungan warga sekitar. Jika dilihat dari topografi wilayah ibu kota negara, banjir memang tidak terjadi di wilayah ibu kota negara tetapi banjir mengancam wilayah pedesaan dibawahnya. Salah satunya di Desa Bukit Raya yang berada di bawah wilayah ibu kota negara dan berjarak 9 Km dari wilayah pembangunan ibu kota. Sebelum pembangunan pemindahan ibu kota wilayah desa ini sudah sering terjadi banjir akibat air sungai yang meluap dan sekarang ditambah hilangnya daerah resapan air di wilayah ibu kota negara yang baru menjadikan desa ini kebanjiran saat hujan deras turun.<sup>84</sup>

Penggusuran rumah milik warga asli daerah pun telah terjadi diakibatkan oleh pelebaran wilayah pembangunan ibu kota negara. Hal ini mengakibatkan kerugian pada masyarakat setempat. Para masyarakat lokal pribumi kebingungan kepada siapa lagi mereka akan mengadu karena hal ini merupakan perintah dari pemerintah yang menjabat yang seharusnya bisa mendengarkan para masyarakat lokal.

Kemudian dalam dokumen presentasi rencana tata ruang IKN yang disusun Bappenas proses konstruksi pada fase awal akan bergantung pada pelabuhan di teluk Balikpapan, saat ini pelabuhan tersebut telah sibuk dengan hilir mudik kapal-kapal besar yang membawa muatan konstruksi untuk

---

<sup>84</sup> <https://youtu.be/yztD26Z7FzY>. “Yang Tidak Dikatakan Jikowi Soal Ibu Kota Baru | Buka Mata”. Diakses pada 19 Oktober 2022 pukul 14.16 WITA.

pembangunan ibu kota negara. Kekhawatiran masyarakat akibat pemindahan ibu kota ini tidak hanya dirasakan oleh warga di darat saja masyarakat pesisir di wilayah teluk Balikpapan pun turut merasa khawatir akan pemindahan ibu kota ini. Teluk Balikpapan akan menjadi jalur akses masuk konstruksi dan distribusi barang menuju wilayah ibu kota negara. Ekosistem flora dan fauna yang berada di wilayah teluk Balikpapan ini telah terancam keberadaannya dikarenakan aktivitas manusia yang semakin masif. Seperti yang terjadi saat ini wilayah terumbu karang di daerah dekat pelabuhan sudah rusak ekosistemnya diakibatkan oleh kapal-kapal besar yang telah sering berlalu lalang di wilayah tersebut sehingga mengakibatkan rusaknya terumbu karang yang berada dibawahnya. Selain itu di daerah teluk Balikpapan juga terdapat padang lamun yang menjadi habitat bagi pesut di wilayah tersebut. Hingga saat ini pesut sudah jarang ditemui di daerah tersebut karena padang lamun yang mulai rusak sehingga mengakibatkan hewan pesut sulit untuk mencari makan di wilayah tersebut, padahal wilayah tersebut adalah ekosistem bagi hewan pesut itu sendiri. Tidak ada aturan konsorsium sehingga mereka tidak memperhatikan mana daerah yang perlu dirusak dan mana yang harus dilindungi. Jika dibiarkan saja hal ini tentu akan merusak Ekosistem flora dan fauna serta lingkungan alam yang berada di wilayah teluk Balikpapan.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> *Ibid.*,

Akibat dari kapal besar yang berlalu-lalang di daerah teluk Balikpapan juga mengancam keberadaan ekosistem mangrove di teluk Balikpapan yang mengakibatkan koloni bekantan yang hidup di daerah tersebut akan berpindah tempat mencari sarang yang aman bagi mereka, padahal wilayah tersebut telah menjadi habitat bekantan. Tidak hanya berdampak bagi flora dan fauna kehidupan nelayan pun juga kian terusik, disebabkan susahny mencari ikan akibat kondisi laut yang semakin tercemar. Hingga saat ini kondisi nelayan di teluk Balikpapan sudah kesusahan untuk mendapatkan ikan tangkapan. Hal ini mengakibatkan para nelayan merugi akibat kurangnya tangkapan ikan yang mereka dapat.<sup>86</sup>

Pembangunan ibu kota baru juga menyebabkan konversi lahan dan hutan, hal ini akan mempengaruhi dan menurunkan daya dukung lingkungan yang mengakibatkan degradasi lingkungan. Pada wilayah pembangunan istana negara mungkin bukan habitat bagi flora dan fauna yang dilindungi, tetapi pembangunan ini memiliki efek jangka panjang yaitu melebarnya pertumbuhan di wilayah ibu kota negara yang bisa menyebabkan hutan-hutan yang masih terjaga akan terusak akibat kehadiran manusia dari urbanisasi. Oleh karena itu perlunya analisis dampak lingkungan (Amdal) dalam rencana utama (*masterplan*) pembamgunan Ibu Kota Negara yang baru guna meminimalkan dampak resiko lingkungan. Pemindahan ibu kota Jakarta ke

---

<sup>86</sup> <https://youtu.be/cTNKAUcdyF4>. “Melihat Perkembangan Pembangunan IKN”.. Diakses pada 19 Oktober 2022 pukul 14.16 WITA.

Kalimantan Timur ini bukanlah solusi yang tepat karena akan memindahkan masalah dari Jakarta ke ibu kota baru tersebut, yang lebih tepat adalah restorasi Jakarta dibanding memindahkannya ke tempat lain.<sup>87</sup>

## **B. Perspektif Fikih Lingkungan Terhadap Kebijakan Pemerintah Pusat Tentang Pemindahan Ibu Kota Negara**

Menyimpulkan dari berbagai urgensi dan mengapa terpilihnya wilayah Kalimantan Timur sebagai wilayah ibu kota baru, dampak fikih lingkungan terhadap pemindahan ibu kota negara, jika dilihat dari kondisi Jakarta sebagai ibu kota saat ini merupakan bentuk meraih kemaslahatan dan menghindarkan dari kemafsadatan. Lain hal jika dilihat dari kondisi Kalimantan saat ini yang mana pemindahan ibu kota ini banyak membawa kerusakan atau kemafsadatan, pertama pindahanya ibu kota ke Kalimantan akan merusak alam di sana yang dikenal sebagai "paru-paru dunia", apabila ini rusak dampaknya bukan hanya mendatangkan bencana di Kalimantan atau Indonesia, melaikan akan merubah iklim dunia dalam sekala global. Kedua, pemindahan ibu kota ke Kalimantan mengancam kelestarian flora dan fauna endemik disana. Ketiga, masyarakat Kalimantan bukannya terbantu dengan pemindahan ibu kota, justru akan semakin diberatkan dengan melawan dua

---

<sup>87</sup> <https://www.suara.com/news/2022/01/19//123032/walhi-ungkap-3-dampak-lingkungan-serius-akibat-pemindahan-ibu-kota-ke-kalimantan> Diakses pada 19 Oktober 2022 pukul 15.16 WITA.

penguasa berupa perusahaan dan negara dalam kompetisi memperebutkan lahan. Keempat, Mereka terancam kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian, penduduk asli juga kemungkinan besar akan dipindahkan dari kampung adat mereka. Kelima, mencerabut kehidupan sosial masyarakat adat dan dapat menghilangkan kelestarian budaya asli Kalimantan dengan seiring masuknya pembangunan ibu kota negara. Kemafsadatan ini sangat harus dihindari bahkan harus di tutup jalannya. Dalam fikih terdapat sebuah kaidah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya “*menolak mafsadah didahulukan daripada mengambil masalah.*”<sup>88</sup>

Kalimantan sebagai paru-paru dunia dan sebagai pusat rehabilitasi satwa serta kebudayaan harus lebih dahulu dijaga. Menutup atau mencegah kemafsadatan dari pemindahan ibu kota ke Kalimantan lebih baik ketimbang mengabil kemaslahatan untuk pemindahan ibu kota Jakarta. Namun, jika pemerintah tetep bersikukuh dalam pemindahan ibu kota ini, maka pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis dalam menangani penolakan-penolakan yang terjadi dengan berbagai macam jaminan yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat Kalimantan sebagai pribumi ibu kota baru dan

---

<sup>88</sup> Abdul Rahman Dahlan, *Op.cit.*, h. 232.

menjamin keberlangsungan flora dan fauna Kalimantan serta menjamin keberlangsungan hutan tropis Kalimantan sebagai paru-paru dunia.

Pemahaman masalah lingkungan hidup (*fiqh al-bi'ah*) serta penanganan penyelamatan maupun pelestariannya perlu diletakkan diatas suatu fondasi moral untuk kesadaran bagi kita semua untuk menyadari pentingnya menjaga lingkungan hidup. Fiqh lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab manusia yang beriman dan merupakan amanat yang diembannya untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan sang pencipta sebagai hunian tempat manusia dalam menjalani aktivitasnya. Manusia yang beriman dituntut untuk memfungsikan imannya dengan meyakini bahwa pemeliharaan lingkungan hidup adalah bagian dari iman itu sendiri. Itulah wujud nyata dari statusnya sebagai khalifah di muka bumi ini yaitu mengemban amanat dan tanggung jawab atas keamanan dan keselamatan lingkungan hidup. Oleh karena itu lingkungan hidup harus terpelihara dengan baik dan terlindungi dari pengrusakan yang berakibat mengancam kehidupan manusia itu sendiri.<sup>89</sup>

Islam berbicara mengenai hidup dan kehidupan secara umum dan mendasar yang meliputi alam semesta dan hari akhir atau hari depan yang berkepanjangan bagi alam raya tersebut. Fikih berbicara mengenai realita kehidupan manusia secara rinci dan bagaimana menata kehidupan tersebut

---

<sup>89</sup> Ali Yafie, *Op.cit.*,h. 160.

selaku bagian integral dari kehidupan itu. Dari sudut pandang inilah fikih ikut berbicara tentang masalah lingkungan hidup yang kini menjadi masalah dunia dan masalah kemanusiaan. Dimana banyak sudah terjadi pengrusakan lingkungan yang diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri.<sup>90</sup>

Islam sebagai keyakinan mayoritas rakyat Indonesia banyak memberi banyak petunjuk kepada umat manusia tentang upaya penyelamatan hidup manusia itu, baik menyangkut kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakatnya ataupun kehidupan lingkungan yang lebih luas. Lima prinsip dasar kehidupan yang menjadi landasan kemaslahatan bagi manusia itu (*al kulliyat al-khams*) diantaranya adalah menyangkut pangkal dan penyebab kehidupan manusia itu sendiri, yaitu perlindungan jiwa, raga, dan kehormatan manusia atau *hifzh al-nafs*. Empat prinsip dasar lainnya adalah *hifzh al-aql* (perlindungan akal), *hifzh al-mal* (perlindungan harta kekayaan), *hifzh al-nashb* (perlindungan keturunan) dan *hifzh al-din* (perlindungan agama).<sup>91</sup> Landasan kemaslahatan ini bisa bertambah dengan berkembangnya kebutuhan manusia seperti saat ini pemahaman masalah lingkungan hidup (*fiqh al-bi'ah*) serta penanganan penyelamatan maupun pelestariannya perlu menjadi landasan kemaslahatan bagi manusia.

Kehidupan alam dalam pandangan Islam berjalan di atas prinsip keselarasan dan keseimbangan. Sangat diharapkan segala tindakan manusia

---

<sup>90</sup> *Ibid.* h. 163

<sup>91</sup> *Ibid.*, h. 164.



harus didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang cermat yang diharapkan agar tindakan tersebut tidak menjadikan kerusakan bagi bumi maupun unsur yang lainnya. Dengan kata lain manusia diingatkan agar tidak hanya berpikir dan bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri, kelompoknya, bangsanya atau etnisnya saja, tetapi perlu untuk memikirkan dan bertindak untuk kemaslahatan semua pihak. Manusia tidak hanya memikirkan dan bertindak untuk masa kini tetapi juga untuk masa yang akan datang. Sebab semua itu termasuk manusia sekalipun berada dalam satu sistem kerjasama yang saling mendukung. Oleh karena itu manusia tidak boleh berlaku sewenang-wenang untuk kepentingan dirinya sendiri. Dalam pandangan Islam hanya Allah sajalah yang berhak menaklukkan alam semesta sedangkan manusia harus memperlakukan alam dengan segenap kehidupan yang ada di dalamnya secara akrab dan menjadikan alam menjadi bagian dari hidupnya.

Manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta yang menentukan kelestarian kehidupan. Segala tindakannya akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun akhirat. Manusia sebagai salah satu jenis dari makhluk yang ada serta sebagai bagian dari alam ini memiliki kedudukan yang terdepan dari makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa manusia diberi keutamaan atau kelebihan dari makhluk-makhluk lainnya yakni memiliki akal fikiran untuk membedakan hal yang benar dan salah.

Pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan atau hukum pelestarian lingkungan hidup adalah *fardlu kifayah*, artinya baik semua orang

atau individu maupun kelompok dan perusahaan bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup, dan harus dilibatkan dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup. Hanya saja diantara yang paling bertanggung jawab dan menjadi pelopor atas kewajiban ini adalah pemerintah. Sebab pemerintah adalah pihak yang mengemban amanat untuk mengurus urusan rakyat termasuk lingkungan hidup. Selain itu pemerintah juga memiliki seperangkat kekuasaan untuk menggerakkan kekuatan menghindarkan dari pelaku kerusakan lingkungan hidup. Kewajiban masyarakat ialah membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup. Selagi lingkungan hidup masih tercemar maka kita semua terus berdosa. Jika *fardlu kifayah* belum tuntas maka usaha atau ikhtiar untuk memenuhi kewajiban itu tidak boleh berhenti.<sup>92</sup>

Dalam realisasinya kebijakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan tidak semulus dan semudah yang di bayangkan. Banyak penolakan-penolakan terjadi, mulai dari penolakan warga Jakarta jika ibu kota dipindahkan sampai penolakan yang digencarkan oleh warga Kalimantan sebagai lokasi ibu kota baru nantinya. Alasan-alasan penolakan pemindahan ibu kota yaitu pertama, alasan pemerintah memindahkan ibu kota tidak masuk akal dan keliru. Ada beberapa alasan yang menjadi latar belakang pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan pemindahan ibu kota.

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, h.201.

Salah satunya yaitu dari banjir, kemacetan hingga ancaman tenggelamnya Jakarta. Logikanya kalau DKI Jakarta rusak, harus diperbaiki. Tapi ini menjadi alasan untuk pindah. Keputusan pemerintah dalam memindahkan ibu kota di tengah berbagai masalah yang melanda Jakarta terkesan seperti lari dan abai dari tanggung jawab. Seharusnya pemerintah menyelesaikan masalah-masalah tersebut ketimbang memilih untuk memindahkan ibu kota. Karena dengan pemindahan tersebut akan mengakibatkan rusaknya ekosistem yang ada di Kalimantan Timur dikarenakan pembukaan lahan dan lain sebagainya.

Pembangunan ibu kota negara di Kalimantan yang wilayahnya dipenuhi dengan hutan pembukaan lahannya pasti menebang, memabat habis hutan bahkan sampai membumi hanguskan hutan demi efisiensi pembukaan lahan. Tindakan ini dapat mengancam bahkan sampai dapat membunuh berbagai macam flora dan fauna yang ada. Dengan membuka hutan sudah pasti akan memabat habis flora (tumbuhan) yang ada dan mengusir, menangkap, memburu, sampai mebunuh fauna (hewan) yang ada di dalamnya. Flora (tumbuhan) langka di Kalimantan Timur yang terancam hilang akibat menyusutnya luas hutan akibat dampak pembangunan berskala besar dari pemindahan ibu kota yaitu Anggrek Hitam, Pohon Ulin, Tengkwang Tungkul, itu semua mengalami penurunan jumlah yang sangat pesat yang menjadikannya terancam punah. Fauna (hewan) langka Kalimantan yang

terancam punah akibat penurunan jumlah yang sangat pesat akibat pembukaan hutan yaitu, beruang madu, orangutan, bekantan, Kucing Merah Kalimantan, Surili berkepala putih, bukan hanya fauna darat yang terancam kepunahannya tetapi fauna air juga yaitu pesut Mahakam dan penyu yang ada di perairan Kalimantan. Flora dan fauna ini perlu di jaga kelestariannya, Kalimantan sebagai pulau dengan julukan “paru-paru dunia” yang di dalamnya terdapat hutan tropis yang lebat seharusnya tidak diganggu dan terus dilestarikan sebagai pusat rehabilitasi satwa.<sup>93</sup>

Meskipun konsep yang ditawarkan pemerintah dalam pembangunan ibu kota baru ini adalah forest city seperti di London, namun belum ada konsep yang utuh yang ditawarkan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. Pembukaan sejumlah besar hutan yang masih asri dan lahan gambut untuk pembangunan ibu kota baru nantinya akan membawa dampak buruk terhadap eksistensi ekosistem dan sumber daya air di sana.<sup>94</sup> Di daerah yang sudah berada di bawah tekanan parah dari deforestasi, menghancurkan lahan gambut akan melepaskan sejumlah besar emisi. Lahan gambut yang dikeringkan sangat rentan terhadap kebakaran, dengan dampak lingkungan, ekonomi dan kesehatan yang serius. Artinya pembukaan sejumlah besar hutan utuh dan lahan gambut untuk pembangunan ibu kota baru akan mengundang terjadinya bencana alam yang tadinya tidak ada menjadi ada. Maka dari itu

---

<sup>93</sup> Susilo Hadi dkk, Op.Cit. h. 173.

<sup>94</sup> Rahardjo Adisasmita dan Sakti Adji Adisasmita, Op.cit. h. 97.

perlunya penilaian dampak lingkungan serta langkah-langkah mitigasi dan adaptasi harus disediakan untuk masa depan. Pemerintah harus memperhatikan betul dampak yang akan terjadi jika pembukaan hutan besar-besaran dilakukan, karena bukan hanya Kalimantan atau Indonesia saja yang akan merasakan dampak pemusnahan hutan tersebut, melainkan seluruh dunia akan merasakan dampaknya, salah satunya yaitu perubahan iklim dunia secara drastis yang akan mengguncang keadaan dunia.

Selain itu dampak dari pemindahan ibu kota akan mengancam seluruh masyarakat adat di dataran Kalimantan. Khususnya suku Dayak, mereka terancam kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Hutan tropis yang rimbun dapat ditebang secara besar-besaran untuk membuka lahan sebagai tempat pembangunan ibu kota baru. Ribuan penduduk asli juga kemungkinan besar akan dipindahkan dari tanah adat leluhur mereka di pulau Kalimantan ketika area hutan yang luas dibuka untuk membuka jalan bagi pembangunan ibu kota baru Indonesia. Penduduk asli Dayak yang tinggal di Kalimantan telah berjuang selama puluhan tahun dalam perjuangan untuk melindungi tanah dan hutan tradisional mereka dari penebangan, pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Orang Dayak telah menjadi korban terus-menerus dari degradasi lingkungan, dan langkah pemindahan ibu kota ke Kalimantan ini secara fisik akan menghancurkan lebih banyak lingkungan mereka.

Jikapun pemindahan ibu kota ini memiliki masalah yang besar untuk rakyat Indonesia kedepannya maka pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis dengan membuat UU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat. Itu penting agar eksistensi adat tak pudar sering pemindahan Ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Memfasilitasi pemetaan wilayah adat terutama di daerah calon ibu kota negara. Menyelesaikan konflik-konflik agraria, lahan antara masyarakat adat dengan perusahaan. Melibatkan utusan masyarakat adat dalam seluruh penentuan kebijakan ibu kota negara baik dalam persiapan maupun selama proses pembangunan. Pembangunan ibu kota negara haruslah bercita rasa nusantara dalam bingkai Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan tidak meninggalkan kearifan lokal, budaya, dan adat istiadat setempat. Menjamin bidang ketenagakerjaan, pemerintah daerah dan pusat memperhatikan keseimbangan agar masyarakat adat agar berkontribusi untuk pembangunan daerah dan bangsanya. Selanjutnya pemerintah juga harus menyusun langkah strategis nasional berkaitan dengan dampak lingkungan akibat pembangunan ibu kota terhadap ekosistem pelestarian kearifan lokal hutan sebagai paru-paru dunia agar di tanami kembali lahan-lahan gundul akibat pertambangan batu bara serta relokasi flora dan fauna endemik pulau Kalimantan. Dengan dilaksanakannya langkah-langkah strategis ini, akan berdampak pada diterimanya kebijakan pemindahan ibu kota oleh masyarakat Kalimantan,

serta efektifnya pembangunan ibu kota baru dan pastinya meminimalisir kerusakan lingkungan hutan dan menjaga flora dan fauna tetap lestari.

Persoalan-persoalan terhadap lingkungan hidup pada akhirnya membawa kepada kesimpulan bahwa semua itu bersumber dari kerangka pandang manusia terhadap alam, yang dilandasi oleh nilai-nilai dan ditata dalam norma-norma tertentu. Dalam kerangka pandang ini, manusia ditempatkan sebagai penguasa mutlak atas alam semesta dibandingkan makhluk-makhluk lainnya yang beraneka ragam jenisnya. Karena itu manusia kemudian berlaku sewenang-wenang melakukan eksploitasi terhadap alam dan segala isinnya. Kerangka pandang itulah yang kemudian mengakibatkan keseimbangan lingkungan hidup terganggu yang juga akan mengancam kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

Jika kita masih berkeinginan untuk menjaga dan menyelamatkan kelangsungan hidup di muka bumi ini serta manusia itu sendiri maka cara pandang seperti ini perlu diubah. Perlu adanya upaya sistematis untuk membangun kesadaran baru tentang lingkungan hidup, mengubah cara pandangan yang akan berdampak terhadap perlakuan kita kepada alam. Karena alam merupakan bagian dari kehidupan dan alam sendiri hidup. Alam beserta isinya seperti air, tanah, tumbuhan, dan lainnya semuanya senantiasa bertasbih kepada Allah dengan caranya sendiri-sendiri. Semuanya termasuk manusia mempunyai fungsi untuk menjaga keseimbangan alam. Cara pandang ini menempatkan manusia sebagai bagian dari alam, sebagai salah satu unsur

yang menjaga keseimbangan alam. Itulah khalifah yang dimaksud dalam Al-Qur'an. Tentu tidak mudah mengubah cara pandang, karena sudah banyak masyarakat yang sudah terperangkap dalam kerangka pandang kapitalisme modern, yang menempatkan alam sebagai objek untuk dieksploitasi dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi. Dengan pendekatan masalah dimaksudkan sebagai upaya integratif dalam membangun moral atau etika yang berwawasan lingkungan dengan membangun kesadaran baru lingkungan hidup.

Jikapun pemindahan ibu kota ini memiliki masalah yang besar untuk rakyat Indonesia kedepannya maka pemerintah harus melakukam langkah-langkah strategis dalam menanggulangi kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan akibat dari pemindaha ibu kota baru ke Kalimantan Timur.